

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

NOMOR ISBN : 978 - 602 - 1643 - 14 - 3

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN V

Gedung Graha Widyatama
Universitas Jenderal Soedirman, 19-20 November 2015



LPPM UNSOED
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan v*

PURWOKERTO 19-20 NOVEMBER 2015

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia serta limpahan rahmatNya, panitia dapat menyelenggarakan Seminar Nasional dan *Call for Papers* Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V. Buku Pedoman dan Kumpulan Abstrak ini merupakan panduan yang dipublikasikan dengan tujuan untuk mempermudah para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Seminar Nasional ini. Seminar Nasional dan *Call for Papers* Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (LPPM-Unsoed) serta menjadi agenda tahunan secara rutin.

Pada Seminar Nasional dan *Call for Papers* kali ini, peserta dikelompokkan ke dalam enam tema bidang riset unggulan LPPM-Unsoed dan satu bidang untuk Ilmu Murni. Bidang-bidang riset unggulan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1). Biodiversitas tropis dan bioprospeksi (*tropical biodiversity and bioprospecting*)
- 2). Pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pedalaman (*marine, coastal, and inland management*)
- 3). Pangan, gizi dan kesehatan (*food, nutrition, and health*)
- 4). Energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*)
- 5). Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM (*entrepreneurship, cooperation, micro & small scale enterprise*)
- 6). Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan (*social engineering and rural development*)
- 7). Bidang Penunjang (Ilmu Murni)

Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Universitas Jenderal Soedirman atas segala bantuan dan dukungannya, serta fasilitas yang disediakan, sehingga Seminar Nasional ini benar-benar terwujud. Kami segenap panitia menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun berbagai kekurangan pasti masih ditemukan di sana-sini.

Akhirnya segala bentuk kritik dan saran tentu saja diharapkan demi kesempurnaannya di masa-masa mendatang.

Ketua Panitia

Dr. Rawuh Edy Priyono

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

TIM Prosiding

Editor Eksternal

Prof. Dr. Irwan Abdullah (Universitas Gadjah Mada).

Dr. Solatun Dulah Sayuti (Universitas Bina Nusantara).

Ir. Soegeng Herijanto, M.P. (Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto).

Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. (Universitas Negeri Sebelas Maret).

Dr. Arief Anshory Yusuf (Universitas Padjajaran Bandung).

Drs. Arywahyono, M.Si,APU. (LIPI Jakarta)

PENYELARAS TIAP BIDANG

Bidang 1. Biodiversitas Tropis dan Bioprospeksi

1. Dr. Nurtjahjo Dwi S, PgDip.AgrSc,MApp.Sc.
2. Dr.rer.nat. W. Lestari, M.Sc.
3. Hanif Nasiatul Baroroh, S.Farm., Apt., M.Sc.
4. Dr. Agus Nuryanto, S.Si. M.Si

Bidang 2. Pengelolaan Wilayah Kelautan, Pesisir dan Pedalaman

1. Dr. Agung Dhamar Syakti, DEA
2. Dr. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si
3. Anandita Ekasanti, S.Pt., M.Si.
4. Maria Dyah Nur Meinita, S.Pi., M.Sc.

Bidang 3. Pangan, Gizi dan Kesehatan

1. Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si
2. Dr.sc.agr. Condro Wibowo
3. Friska Citra Agustia, M.Sc.
4. Agnes Fitria Widiyanto, SKM., M.Sc.
5. Dr. Rumpoko Wicaksono, S.P., M.P.

Bidang 4. Energi Baru dan Terbarukan

1. Dr. Mukhtar Effendi, S.Si., M.Eng
2. Dr. Suroso, S.T., M.Eng
3. Supriyanto, S.Si., M.Si.
4. Ropiudin, S.TP., M.Si.

Bidang 5. Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM

1. Dr. Sudarto, M.M.
2. Dr. M. Sulthan, S.IP., M.Si.
3. Dr. Ir. Kusmantoro Edy Sularso, M.S.
4. Ir. Taufik Budi Pramono, Msi
5. Akhmad Rizqul Karim, S.P., M.Sc.

Bidang 6. Rekayasa Sosial dan Pengembangan Pedesaan

1. Dr. Wahyuningrat, M.Si.
2. Dr.rer,nat. Yusuf Subagyo, M.P.
3. Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si
4. Rahab, SE, M.Sc
5. Dr. Agus Raharjo, SH, M.Hum
6. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

Bidang 7. Bidang Penunjang (Ilmu Murni)

1. Dr. Ing. R. Wahyu Widanarto, S.Si., M.Si
2. Ari Asnani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
3. Dr. Idha Sihwaningrum, M.Sc.St
4. Wahyu Tri Cahyanto, S.Si., M.Si., Ph.D

NOMOR ISBN : 978 - 602 - 1643 - 14 - 3

**SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Assalamualaikum Wr Wb

Yth. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Dr.Ir.Achmad Iqbal, M.Si

Yth. Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si

Yth. Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Program Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman

Yth. Bupati Banyumas

Yth. Kapolres Banyumas dan Kapolsek Purwokerto Utara

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto

Yth. Akademisi UGM, Prof. Dr.Irwan Abdullah

Yth. Budayawan Asal Banyumas, H.Ahmad Tohari

Yth. Akademisi UNSOED, Prof.Rifda Naufalin

Yth. Para Pemakalah, tamu undangan dan hadirin sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri acara Seminar Nasional Percepatan Desa Berdikari melalui Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.

Seminar nasional dengan tema Percepatan Desa Berdikari melalui Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V ini merupakan seminar tahunan yang menjadi salah satu program Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2015 ini, kegiatan seminar nasional dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan dies natalis Universitas Jenderal Soedirman yang ke-52. Seminar nasional ini menjadi salah satu media wajib bagi para peneliti di Universitas Jenderal Soedirman untuk mendesiminasikan hasil-hasil penelitiannya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa melalui kegiatan seminar ini diharapkan akan terjadi tukar menukar informasi, pengalaman, ide, pendapat dan penemuan sehingga akan tercipta hubungan yang lebih baik, yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama di

saat yang akan datang. Sumbangan pikiran dan hasil nyata para peneliti akan memberikan peran penting dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Kepada para *keynote speaker*, pemakalah, dan semua pihak yang telah membantu kesuksesan pelaksanaan seminar nasional ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kepada Saudara Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dengan semangat pantang menyerah sehingga seminar nasional dapat terlaksana, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga seminar ini akan memberikan manfaat dalam upaya percepatan desa berdikari melalui Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V.

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Bila ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu/Bapak/Sdr sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Selamat berseminar.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Ketua LPPM Unsoed,

Prof.Dr.Ir.Suwarto.,M.S



**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DALAM RANGKA
SEMINAR NASIONAL**

**“ PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERDESAAN
DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN “**

**Auditorium Graha Widyatama
Kamis, 19 November 2015
Pukul 08.30**

***Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,***

Yth. Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si

Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semata atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, maka *alhamdulillah* kita dapat hadir di Auditorium Graha Widyatama dalam pembukaan acara Seminar Nasional Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

Hadirin yang kami hormati,

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita berada di era globalisasi, di mana bahasan tentang internasionalisasi dan interaksi antar bangsa menjadi tema yang kerap kali didiskusikan. Setidaknya, di saat dekat ini adalah di mana kita akan masuk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana arus pergerakan serta pertukaran sumberdaya manusia, barang dan jasa, termasuk properti intelektual yang bersifat lintas negara menjadi realitas yang tidak terpisahkan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks seperti ini, apakah berbicara tentang perdesaan dan kearifan lokal masih menjadi relevan? Jawabannya adalah *iya* dan *justru menjadi sebuah kebutuhan bagi bangsa*. Mengapa demikian? Potret terbesar sumberdaya di Indonesia berada di perdesaan, baik sumberdaya manusia maupun alamnya. Ketika ini diabaikan, maka kita justru akan kehilangan kesempatan untuk menjadikan momentum globalisasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Kita hanya akan menjadi penonton, terpinggirkan bahkan yang lebih menyedihkan lagi menjadi tamu di negerinya sendiri.

Hadirin yang kami hormati,

Namun, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan sinergi dengan semua pemangku kepentingan dan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui inovasi ide, gagasan dan karya yang bernilai tepat guna dan hasil guna di mana kesemuanya tersebut bersumber dari masyarakat dan kembali untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami percaya, ketika masyarakat mampu membangun kemandiriannya, dapat berdiri di atas kaki sendiri maka dia akan menjadi tuan rumah di

negerinya sendiri. Tidak hanya itu, dengan kapasitas yang dimiliki maka masyarakat akan dapat memanfaatkan globalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan bukan menjadi sebatas objek serta konsumen belaka.

Oleh karenanya, kami selaku pribadi sekaligus pimpinan universitas mengapresiasi penyelenggaraan seminar nasional kali ini. Kami berharap, seminar ini dapat menjadi ajang diskusi dan unjuk prestasi para akademisi. Hasil-hasil penelitian tidak hanya menjadi sebatas laporan, melainkan dapat didiseminasikan dan dipublikasikan sehingga sangat mungkin merangsang lahirnya ide dan gagasan baru yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran LPPM UNSOED, panitia pelaksana, narasumber dan peserta seminar yang telah memungkinkan acara ini terselenggara sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dapat memampukan kita dalam berikhtiar untuk melakukan kebaikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkearifan.

***Maju Terus Pantang Menyerah,
Wassalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh***

ttd,

Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si
Rektor

**KOMITE SEKOLAH: MASIHKAN MEMILIKI PERAN STRATEGIS
DALAM TATA KELOLA PENDIDIKAN?¹**

**KOMITE SEKOLAH: MASIHKAN MEMILIKI PERAN
STRATEGIS DALAM TATA KELOLA PENDIDIKAN?²**

Muslih Faozanudin, Bahtaruddin, Mahmud Setiahad³

(muslihgz@gmail.com)

Abstract:

The designed of school commiteess is the form of citizens involvement in school governance, to achieve accoutability. This papers is aimed at analysing the role of school commitees on public basic schooll governance in Banyumas regency. The result of the reserach showed that, the School commite has a stratgeic role for improving basic education. However, it's role has no optimally implemented for all school. This is depend on how the relation between school commtee and school management (head master). The better the relation between them, the more optimal the role of the commite. Otherwise, it would not be effective.

Key words: accountabilty, school commitee,, goveernance,,

Abstraks

Pembentukan komite sekolah dalam tata kelola pendidikan merupakan wujud tentang perlunya keikutsertaan masyarakat, dalam penyelenggaraan pendidikan, agar dapat terwujud tata kelola yang akuntable. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran stategis komite sekolah dalam tata kelola pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri, khususnya di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komite sekolah memiliki peran yang strategis dalam ikut serta memajukan pendidikan pada jenjang SD. Namun demikian, peran tersebut tidak selalu optimal pada semua sekolah. Kondisi tersebut tergantung dari pola hubungan yang terjalin antara pihak Komite Sekolah dengan manajemen

sekolah. Semakin baik pola hubungan yang terjalin di antara kedua lembaga tersebut, cenderung semakin optimal peran komite sekolah. Tetapi sebaliknya peran yang dijalankan komite tidak efektif, ketika pola hubungan yang terjalin kurang seimbang dan harmonis

Kata Kunci: akuntabel, komite sekolah, tatakelola,

Pendahuluan:

Seiring dengan tuntutan tata kelola pendidikan, telah dilakukan beberapa perubahan terkait dengan tata kelola pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah., yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 yang diperbaharui dengan PP Nomor 66 tahun 2014 tentang ‘Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan’. Kebijakan tersebut secara umum mengatur tentang bagaimana proses manajemen dan tata kelola untuk semua jenjang pendidikan baik satuan pendidikan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah, satuan pendidikan, termasuk pada pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.

Salah satu model yang dikembangkan dalam kebijakan tersebut adalah diperkuatnya sistem pengelolaan sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Prinsip dasar dalam model tersebut adalah bahwa penyelenggaraan sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, dan akses berkeadilan. Untuk meningkatkan akuntabilitas proses pengelolanya, tata kelola tersebut dilakukan oleh dua organ yaitu: kepala sekolah yang menjalankan tugas atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarah, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah (lihat pasal tentang tata Kelola Pendidikan). Penerapan model tersebut sejalan dengan pemikiran Crawford dan Helm, (2009:73) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan tanggungjawab dalam tata kelola pendidikan, merupakan suatu hal yang sangat penting. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban atas tugas dan peran yang diberikan kepada para pemangku kepentingan,

sedangkan tanggungjawab pertanggungjawaban pengelola terhadap pemberi tugas

Walaupun kebijakan tersebut telah cukup lama diterapkan, namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum secara efektif. Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pengelolaan pendidikan, pada satuan pendidikan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa kasus diketahui bahwa masih banyak komite sekolah yang belum menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan (Faosanudin, 2013). Fungsi komite sekolah lebih cenderung ditempatkan hanya sebagai mitra dalam menggalang dana, tetapi tidak diikutsertakan dalam pengawasan (Kompas, 23/7/2010). Bahkan dalam beberapa kasus, komite sekolah sering hanya sebagai 'stempel' bagi berlangsungnya pelanggaran yang ada di sekolah, atau sebaliknya, komite sekolah hanya sebagai alat untuk legalisasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah (Kompas.com, 23/7/2010).

Sektor pendidikan merupakan sektor publik secara ideal penting menerapkan model *public governance*, karena pemangku kepentingan dari sektor ini cukup luas, yang dapat meliputi pemerintah, manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, warganegara secara umum, lembaga swasta, dan lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan (Bulkley, 2002:131; Mc. Adam, 2006:137). Didalamnya terdapat proses dan cara dimana para pemangku kepentingan saling berinteraksi dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, melalui serangkaian kegiatan pembuatan keputusan dan tindakan bersama. (OECD, 2011:98; Christensen, 2012:4 dan Abbasi, 2011). Untuk menjamin terselenggaranya '*public governance*'. Bovaird dan Loffer (2003:17) mengemukakan beberapa prinsip yang perlu dijalankan, yaitu: keterlibatan warga negara; transparansi; akuntabilitas; kesetaraan dan inklusi sosial; kemampuan bersaing dalam lingkungan global; kemampuan bekerja secara efektif dalam kemitraan; keberlanjutan dan menghormati hukum. Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, Pannaker (2011:8) juga mengemukakan empat prinsip nilai yang perlu dalam *public governance*, yang meliputi: kejujuran ; ekuitas adalah nilai proses

yang diharapkan penyedia pelayanan publik; transparansi, yang merupakan nilai moral administrator publik; dan keabsahan, yaitu integritas pemerintahan dari sisi hukum.

Seiring dengan tuntutan tata kelola pendidikan yang semakin baik, desentralisasi dan otonomi penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prinsip yang mampu mengarahkan institusi dan satuan pendidikan menjadi lebih mandiri dalam pengelolaannya, dengan tetap dapat mengakomodasikan kepentingan dari semua pihak (Alisyahbana, 2010).

Menurut PP No 66 tahun 2010, terdapat dua organ utama dalam sistem tata kelola pendidikan dasar dan menengah, yaitu kepala sekolah yang menjalankan tugas atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah. Selain ke dua organ utama, masyarakat juga diberikan ruang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dimaksudkan untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Tulisan ini akan menganalisis tentang peran strategis Komite sekolah dalam tata kelola pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yang didasarkan hasil penelitian di wilayah kecamatan cilongok dan Purwokerto Timur

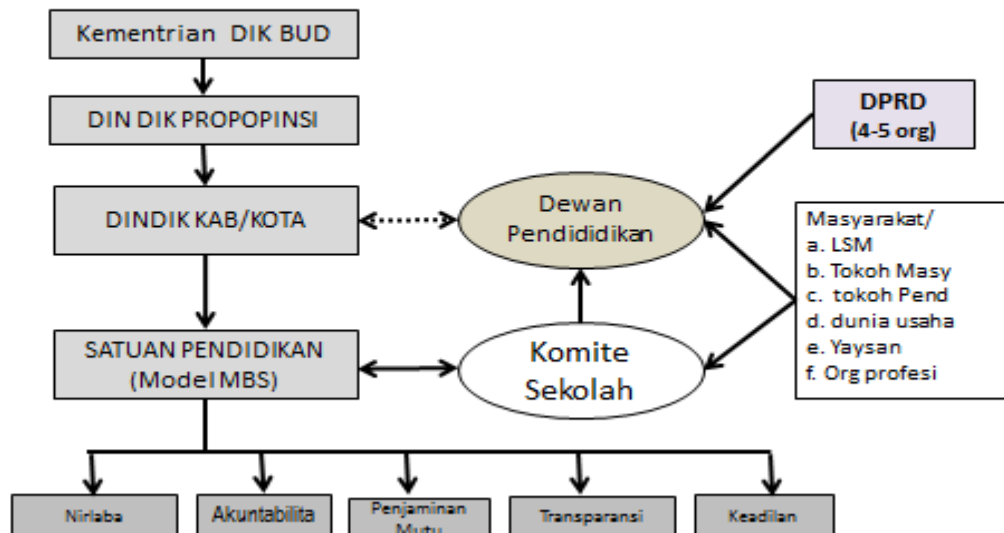
Metode Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan mengambil 2 Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Purwokerto Timur dan Kecamatan Cilongok, Sebagai situs utama adalah SD Negeri Pagaraji 1 Kecamatan cilongok, dan SD Negeri 3 Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang lebih menekankan pada konteks, latar penelitian dan referensi yang bersifat subjektif (Marshal and Rosman, 1989:46). Pendekatan ini menuntut seorang peneliti memiliki ketrampilan,

kepekaan teoritis dan sosial yang memadai, dan kemampuan pengamatan secara cermat dan kecakapan berinteraksi (Strauss & Corbin, 2003:8). Desain analisis menggunakan format deskriptif-kualitatif, yang ditujukan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi atau karena gejala-gejala tidak memungkinkan diukur secara tepat (Garna, 1999:32; Bungin, 2013:146). Berdasarkan desain tersebut, data dibangun dari hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Analisis data penelitian menggunakan langkah-langkah analisis model alir yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992:18), yang terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian:

Secara normatif, komite sekolah memiliki peran yang cukup strategis dalam tata kelola Pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Perna tersebut tergambar secara struktural tentang peran Komite sekolah, seperti yang tertera dalam gambar 1. Dari gambar di atas dapat dijelaskan, komite sekolah memiliki peranan strategis dalam tata kelola pendidikan khususnya dalam pendidikan dasar dan menengah. Komite sekolah merupakan organisasi mitra yang diharapkan mampu untuk menjadi penyeimbang dan pengontrol bagi berlangsungnya tata kelola pada satuan pendidikan. Dengan demikian, Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan senantiasa mendapatkan pengawasan dari komite sekolah. Tata kelola sekolah yang didasarkan pada model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengharuskan adanya peran lembaga lain di luar sekolah yang mampu mengontrol aktivitas sekolah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang meliputi: Nirlaba, Akuntabilitas, Penjaminan Mutu, Transparansi dan Keadilan.



Gambar .1.

Model Tata Kelola Pendidikan dasar dan Menengah
menurut PP No 66 tahun 2010

Namun demikian tata kelola pendidikan dasar, yang dikonsepsikan sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, dalam realitasnya masih sebatas administratif. Sekolah sebagai entitas penyelenggara pendidikan pada level terendah dan terdepan, tidak memiliki otonomi yang sesungguhnya. Dengan kata lain model pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan PP No 66 tahun 2010, tidak memberikan ruang yang cukup bagi sekolah untuk melakukan kegiatan dan aktifitas yang lebih luas, yaitu sebatas pada urusan-urusan yang sifatnya fungsional atau desentralisasi fungsional (Mark & Turner:1997), atau dalam kosep Chema dan Rondinelly (1985) masih sebatas dekonsentrasi adminsitratif, dimana sekolah sebagai entitas satuan pendidikan dan sebagai subordinasi dari pemerintah daerah, hanya menjalankan kewenangan dari dinas pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan. Kondisi ini diperkuat lagi dengan kondisi di lapangan bahwa anggaran pendidikan pada sekolah hampir secara keseluruhan berasal dari alokasi yang diberikan dari pemerintah (baik pemerintah pusat,

maupun pemerintah daerah), melalui mekanisme dana BOS. Sekolah hanya berwenang untuk membuat perencanaan sesuai dengan alokasi yang diberikan, dan menjalankan serta mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, komite sekolah yang dibentuk sebagai pengontrol, pengarah dan pemberi pertimbangan, dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan oleh komite sekolah. Komite sekolah dilibatkan ternyata dilibatkan cukup jauh dalam proses manajemen, dimana komite sekolah ‘sekolah’ harus ikut mempertanggungjawabkan perannya kepada pemerintah. walaupun sebenarnya apa yang dilakukannya saat ini cenderung hanya sebagai peran legalisasi atas kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Ketika kegiatan sekolah sudah mendapat persetujuan dari komite, maka kegiatan tersebut dianggap telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, padahal dilihat dari prosesnya, banyak komite yang tidak banyak tahu tentang proses penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan penjelasan di atas, maka komite sekolah penting memiliki peran yang penting dalam manajemen sekolah, karena secara normatif dibutuhkan bagi legalitas dan otorisasi aktivitas sekolah, namun keterlibatan Komite sekolah dalam manajemen sekolah sangat bervariasi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kedalaman peran yang dilakukan oleh Komite sekolah, yang dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, seperti terlihat dalam tabel 1:

Dari tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa, sekolah dasar yang berada di wilayah perkotaan, cenderung mudah untuk dikelola dibandingkan dengan yang berada di wilayah Pedesaan. Namun demikian yang paling mudah adalah bagi sekolah dasar yang dianggap sekolah favorit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi untuk melihat perbedaan tersebut. Dilihat dari latar belakang pengurus komite Sekolah untuk sekolah yang berada di wilayah Pedesaan biasanya merupakan tokoh masyarakat, sedangkan di wilayah perkotaan dan sekolah favorit, sebagian besar adalah pejabat atau tokoh-tokoh berpengaruh. Oleh karena itu tingkat pendidikan pengurus komite sekolah, untuk SD yang di wilayah

perkotaan dan sekolah favorit, cenderung lebih memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SD yang berada di wilayah pedesaan.

Tabel 1. Karakteristik Komite sekolah berdasarkan Lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas

Dimensi	Karakteristik Wilayah Sekolah		
	Sekolah Favorit	Perkotaan	Perdesaan
• Latar Belakang Pengurus	Sebagian besar Pejabat	Pejabat/Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat
• Tkt. Pendidikan Pengurus Komite	Secara umum tkt Pendidikan tinggi	Cukup Tinggi	Secara umum Tkt Pendidikan menengah
• Kondisi Sosial Ekonomi Wali Murid	Menengah - tinggi	Menengah	Cenderung rendah
• Kesadaran Wali Murid thd pendidikan	Tinggi	Cukup Tinggi	Cenderung kurang
• Kedekatan komite dg Kep sekolah	Cenderung Akrab	Cenderung Akrab	Cenderung Cukup
• Penggalangan Dana SD	Mudah	Cenderung Mudah	Cenderung Sulit

Sumber: Data Penelitian, Faozanudin, 2014

Dilihat dari sisi kedekatan hubungan antara antara komite sekolah dengan kepala sekolah/manajemen sekolah, juga bervariasi, dan dipengaruhi pula oleh keberadaan sekolah, tingkat pendidikan dan latarbelakang dari komite sekolah, Komite sekolah yang berada di wilayah perkotaan biasanya lebih akrab dengan pihak kepala sekolah atau manajemen sekolah dibandingkan dengan komite sekolah bagi SD yang berada di wilayah pedesaan.

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi wali murid, wali murid dari sekolah yang berada di wilayah pedesaan cenderung dalam tingkat rendah dibandingkan dengan yang ada di perkotaan yang relatif menengah dan tinggi. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kesadaran wali murid terhadap pentingnya pendidikan, dimana sekolah yang berada di wilayah perkotaan memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di wilayah pedesaan. Kondisi yang demikian, sejalan dengan tingkat kemudahan dalam proses penggalangan dana untuk membantu proses pendidikan. Untuk SD di wilayah perkotaan lebih mudah untuk menggalang dana dari pada SD yang berada di wilayah Pedesaan.

Dengan karakteristik seperti di atas, kondisi SD yang berada di wilayah perkotaan terlihat dan cenderung lebih maju, baik dalam sistem manajemen sekolahnya, maupun dalam kondisi sarana prasarana pendidikan. Dengan dukungan komite sekolah dengan latar pendidikan yang cenderung tinggi dan terpelajar, sistem manajemen yang diterapkan di Sekolah lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada sistem perencanaan, implementasi rencana dan sistem monitoring program di sekolah yang cenderung berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana pendidikan SD yang berlokasi di wilayah perkotaan lebih lengkap dibandingkan dengan SD yang berlokasi di wilayah pedesaan. Kesadaran orang tua murid untuk ikut serta dalam proses penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama perpustakaan sekolah cenderung lebih baik.

Dari realitas tersebut dapat dikatakan bahwa, peran komite sekolah dalam tata kelola sekolah tergantung kepada pola hubungan yang terjalin antara komite sekolah dengan manajemen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin harmonis hubungan antara komite sekolah dengan manajemen sekolah, semua peran komite sekolah dapat dilaksanakan. Sebaliknya semakin kurang baik hubungan yang terjalin antara komite sekolah dengan manajemen sekolah, maka cenderung sulit untuk menjalankan program-program sekolah.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa, ada beberapa pada sekolah yang tata kelolanya kurang baik disebabkan kurang harmonisnya hubungan antara komite sekolah dengan manajemen sekolah. Kondisi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola hubungan yang terjalin diantara kedua lembaga tersebut:

Pertama, Terjadinya kurang sepehaman antara komite sekolah dengan manajemen sekolah (kepala sekolah) terkait dengan program-program sekolah. Ketidak harmonisan tersebut dapat bermula dari konflik individu dari salah satu pengurus komite sekolah dengan pihak kepala sekolah. *Kedua*, Dominannya peran kepala sekolah dalam tata kelola, sehingga sering meninggalkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, sehingga pihak komite sekolah merasa sering dilangkahi dalam pengambilan keputusan, dan cenderung hanya dijadikan sebagai otorisator atas kegiatan sekolah. *Ketiga*, Dominannya komite sekolah dalam dalam pengambilan keputusan, sehingga kepala sekolah dipaksa untuk ikut serta mengikuti sebagian kemauan Komite sekolah. Kondisi ini terjadi ketika ketua komite atau anggota komite sekolah memiliki status sosial dan kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan Kepala sekolah.

Dengan pola hubungan tersebut, tata kelola pendidikan dasar, khususnya pada tingkat SD Negeri, memang tidak lepas dari kondisi dari masing-masing sekolah, baik dilihat dari lokasi sekolah maupun kondisi latar belakang wali muridnya.

Terkait dari pola hubungan tersebut, manajemen sekolah yang memiliki hubungan harmonis dengan komite sekolah, maka lebih mudah untuk menjalankan program-programnya. Bahkan manajemen sekolah dapat lebih memanfaatkan keharmonisan tersebut untuk lebih jauh 'mengeksploitasi' komite sekolah dengan cara membuat banyak program untuk kegiatan sekolah dan mendorong komite sekolah untuk ikut serta dalam pembiayaan program sekolah, dengan 'argumentasi' untuk peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun penarikan dana dari masyarakat sudah tidak diperbolehkan, namun dari realitas, masih banyak sekolah melalui komite sekolah yang melakukan penarikan biaya sekolah kepada wali murid dengan mengatas namakan 'infaq'.

Berdasarkan kasus diatas, maka komite sekolah masih memiliki peran strategis dalam ikut serta memajukan program dan kegiatan sekolah, terutama bagi pendanaan kegiatan sekolah. Selain itu, komite sekolah sebenarnya memiliki peran stratgis dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di sekolah. Walaupun secara normatif, untuk jenjang pendidikan dasar tidak

diperbolehkan lagi untuk menarik pembiayaan kepada wali murid, namun dalam kenyataannya banyak sekolah yang melakukan hal tersebut, (Faozanudin, 2014).

Kesimpulan

Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, komite sekolah memiliki peran yang strategis dalam ikut serta memajukan pendidikan pada jenjang SD dan untuk akuntabilitas implementasi program dan kegiatan sekolah. Namun demikian, peran tersebut tidak selalu optimal pada masing-masing sekolah. Kondisi tersebut tergantung dari pola hubungan yang terjalin antara pihak Komite Sekolah dengan manajemen sekolah. Semakin baik pola hubungan yang terjalin di antara kedua lembaga tersebut, cenderung semakin optimal peran komite sekolah. Tetapi sebaliknya peran yang dijalankan komite tidak efektif, ketika pola hubungan yang terjalin kurang seimbang dan harmonis.

Ucapan Terimakasih.

Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah membiayai penelitian ini, dan juga LPPM Unsoed yang ikut serta dalam proses tata kelola penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abbasi, Aliya, 2011, Public Sector Governance in Pakitasn, *Board of Investment*, Volume 2, No 2.1 Quarter I, 2011
- Alisyahbana, Armida, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, 2000, dalam, http://data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf, download, 4 Oktober 2010
- Ansell, Chris and Allison Gash, 2007, Collaborative Governance Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory (JPART)*, Vol. 18 No. 13, November 2007, pp 543-571
- Bovaird, Loffler, 2003, *Evaluating the Quality of Public Governance: Indicators, Models and Methodologies*, London: International Review of Administrative science,

- _____, 2009, *Public Management and Government*, New York: Routledge.
- Bulkey, Kartina, 2002, *Balancing Act: Educational Management Organization and Charter School Autonomy*, Paper presented in the Annual Meeting of the American Educational Research Association, *Consortium for Policy Research in Education*, New Orleans, 1-5 April 2002
- Bungin, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Christensen, Tom, 2012, *Post NPM and Changing Public Governance*, *Meiji Journal of Political Science & economic*, Volume I 2012
- Crawford & Helm, 2009:73, *Government and Governance: The Values of Project Management in The Public Sector*, *Project Management Journal*, March, 2009, pp 73-87
- Faozanudin, Muslih, 2013, *Pengaruh Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas*, Disertasi Bandung: Universitas Padjajaran
- _____, 2014, *Tata kelola Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas* Laporan Penelitian Unggulan 2014
- Gagan, 1996, *Effective Public Governance in Education*, Oregon, Simon Fraser University.
- Gaule, Eagle, 2010, *Public Governance Decentralization Modelling in the Contest of Reform*, Lithuania: Kansas University of Technology.
- Marshall, Catherine & Gretchen B. Rosman. 1989. *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publication
- Mark & Turner:1997, *Governance, Administration and Development, : Making The state Work*, London: MacMilan Press Ltd,
- Mc Adam, Donalds, 2006, *What School Boards Can Do Reform Governance for Urban Schools*, New York: Teacher College, Columbia University

Miles, Matthew B. & A Michael Huberman. 1992. *Analisis Dta Kualitatif: Bukus Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia Press

OECD, 2011, *OECD Public Governance Review, Estonia Toward a Single Government Apparoch*, Eastonia

Peter, B Guy, 2001, *TheFfuture of Governinng*, 2d edition, University Press of Kansas.

Kompas.com. Jumat (23/7/2010),

Kompas.com. Jumat (23/7/2010).”



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JENDRAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**



LPPM UNSOED
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT